

Judul : Publik dan Presiden Satu Kata Desak Pengesahan RUU TPKS
Tanggal : Selasa, 11 Januari 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 5

LEGISLASI

Publik dan Presiden Satu Kata Desak Pengesahan RUU TPKS

JAKARTA, KOMPAS — Isu kekerasan seksual sekarang telah menjadi perhatian publik. Masyarakat sepakat dengan permintaan Presiden Joko Widodo agar Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual segera disahkan.

Demikian hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) tentang "Sikap Publik terhadap RUU TPKS dan Peraturan Menteri tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus: Temuan Survei Nasional" yang diluncurkan pada Senin (10/1/2022) secara daring.

SMRC melakukan survei nasional terhadap 2.420 responden pada Maret dan Mei 2021. Survei itu diperbarui dengan wawancara tatap muka pada 8-16 Desember 2021 dan telepon pada 5-7 Januari 2022.

Dari survei tersebut ditemukan, dukungan terhadap RUU TPKS dan Permendikbudristek diberikan oleh mayoritas responden (65 persen) yang mewakili pemilih nasional di hampir semua lapisan demografi dan wilayah. Dari total responden, hanya 21 persen yang tidak setuju dan 14 persen yang tidak punya sikap terkait RUU TPKS.

"Ini modal yang penting bagi Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah untuk dapat mengesahkan RUU TPKS menjadi UU," ujar Saidiman Ahmad, Manajer Program SMRC.

Hadir memberikan tanggapan atas hasil survei itu Menteri

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim. Hadir pula anggota Komisi IV DPR, Luluk Nur Hamidah; anggota Komisi X DPR, Ledia Hanifa Amalia; anggota Komisi III DPR, Taufik Basari; serta Ketua Komnas Perempuan 2010-2014 Yuniyanti Chuzaifah.

Saidiman menyatakan, dilihat dari opini publik nasional pada umumnya, dua kebijakan yang terkait dengan kekerasan seksual tersebut tidak menimbulkan resistensi. Sebaliknya, kebijakan itu mendapatkan dukungan publik. Bahkan, dukungan mayoritas terhadap pengesahan RUU TPKS konsisten sejak survei pada Maret 2021.

Kalaupun ada opini negatif di tingkat elite dan massa sebagaimana muncul di berbagai media, opini tersebut tidak mewakili opini publik nasional. "Opini negatif yang relatif sedikit itu wajar dalam sebuah masyarakat yang majemuk dan bebas untuk menyatakan pendapat," kata Saidiman.

Adapun pandangan publik terkait Permendikbudristek tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, mayoritas publik yakin peraturan tersebut merupakan upaya untuk melindungi korban. Begitu juga apakah permendikbudristek tersebut membenarkan atau tidak membenarkan perzinahan, mayoritas responden menyatakan permendikbudristek tersebut bu-

kan pembenaran atas perzinahan.

Nadiem Makarim menyambut baik hasil survei tersebut. Menurut dia, Permendikbudristek No 30/2021 melewati proses yang panjang. Bahkan, setelah peraturan menteri tersebut disahkan muncul banyak sekali respons dari masyarakat.

"Sampai hari ini kami terus menerima masukan sebagai bahan pertimbangan bagaimana mendorong terwujudnya pendidikan yang merdeka dari kekerasan seksual," ujar Nadiem.

Yuni menilai survei tersebut penting karena isu kekerasan seksual merupakan isu publik dan survei tersebut juga bagian dari upaya menghentikan banalitas kekerasan seksual. "Survei ini memperlihatkan masyarakat semakin jernih berpikir dan mungkin lelah pada politik agama. Ini juga bentuk kesadaran publik yang lebih kuat," katanya.

Mempercepat pembahasan

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly, mengatakan, pemerintah siap membahas RUU TPKS bersama DPR. Untuk itu, pemerintah berharap DPR segera menyelesaikan pembahasan draf RUU TPKS yang merupakan inisiatif lembaga legislatif.

"RUU TPKS ini adalah usul inisiatif dari DPR dan masih ada ganjalan di DPR sehingga be-



KOMPAS/BERGASATA INDRATI RIATMO

Warga melintas di depan mural berisi dorongan untuk pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), di Stadion Kridosono, Yogyakarta, Senin (10/1/2022). Berbagai elemen masyarakat terus menyuarakan urgensi pengesahan RUU tersebut.

lum dibawa ke rapat paripurna. Mengingat urgensi RUU itu, kami harapkan dalam masa sidang yang akan datang sudah disahkan menjadi RUU inisiatif DPR dan dikirim ke Presiden. Dengan demikian, Presiden juga bisa segera mengeluarkan sur-

pres menunjuk menteri yang mewakili pemerintah untuk membahas RUU tersebut bersama DPR," tutur Yasonna, Rabu (5/1).

Presiden Joko Widodo telah meminta jajarannya untuk segera menyiapkan daftar inven-

tarisasi masalah (DIM) meski draf RUU TPKS belum selesai disusun DPR. Percepatan pembahasan itu penting untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin perlindungan bagi korban kekerasan seksual. (SON/REK/DEA)